

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sebagai negara kepulauan yang besar, sektor maritim Indonesia menjadi komponen esensial yang keamanannya perlu dijaga dari segala ancaman melalui pengambilan langkah-langkah keamanan maritim oleh pemerintah. Tindakan responsif untuk mencegah ancaman maritim menjadi domain stabilitas keamanan di wilayah yang menjadi cakupan yurisdiksi. Dengan status keanggotaan Dewan IMO, Indonesia memanfaatkan perannya untuk memberikan kontribusi dan membuktikan komitmen terhadap keamanan maritim. Hal ini juga adalah bukti peran Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk meraih kepentingan nasional dan meningkatkan citra keamanan maritim Indonesia di ranah internasional serta.

Indonesia mengadopsi aturan IMO terkait ISPS Code mengingat pentingnya sektor kepelabuhanan sebagai bagian vital dalam sektor maritim khususnya di dunia pelayaran. ISPS Code merupakan rezim internasional untuk memastikan kepercayaan bahwa tindakan keamanan maritim yang diambil telah cukup proporsional berada pada tempatnya, seperti kondisi di mana proses pengumpulan data dan pertukaran informasi yang efektif terkait keamanan dapat terlaksana dengan baik karena adanya metodologi penilaian keamanan berdasarkan rancangan dan prosedur dalam mengambil langkah-langkah perubahan tingkat keamanan. Sejak diberlakukannya ISPS Code di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia, fasilitas dan teknologi pelabuhan menjadi lebih maju, tindak kriminalitas sangat minim, pelabuhan menjadi tertib dan terawasi, arus lalu lintas kapal di pelabuhanpun meningkat. Berdasarkan catatan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, sudah ada 132 pelabuhan Indonesia yang *comply* dengan ISPS Code di tahun 2018, kemudian ada penambahan sebanyak

164 pelabuhan di tahun 2019, dan 11 pelabuhan di tahun 2020 ditandai dengan terdaftarnya nomor *Sertificate of Compliance of Port Facility* (SoCPF). Pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat disinggahi oleh kapal asing yang memiliki sertifikat keamanan kapal internasional yakni *International Ship Security Certificate* (ISSC). Berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Hubla Tahun 2019, keamanan pelabuhan di Indonesia saat ini berdasar di tingkat keamanan 1 yakni kondisi keamanan yang normal. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan ISPS Code sebagai rezim internasional berhasil menjalankan fungsinya untuk membentuk perilaku yang patuh terhadap prinsip, norma, dan aturan. Lalu rezim tersebut menempatkan peran aktor di dalamnya dan dapat membentuk mekanisme pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan.

6.2 Saran

Berdasarkan penemuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai peran Indonesia sebagai Anggota Dewan *International Maritime Organization* (IMO) dalam Menegakkan Keamanan Pelabuhan melalui implementasi *International Ship and Port Security Code* (ISPS Code) di Indonesia, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik lagi. Indonesia wajib untuk senantiasa mempertahankan keamanan maritim dengan mengambil sikap terhadap permasalahan internasional dan memberikan sumbangsih dalam penyelesaian masalah tersebut. Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia sudah berhasil memosisikan diri dalam upaya penegakkan keamanan maritim dan mengimplementasikan ISPS Code di pelabuhan-pelabuhan besar tempat aktivitas pelayaran internasional berlangsung. Akan tetapi, evaluasi rutin terkait keanggotaan Indonesia di dalam IMO harus selalu dilakukan untuk melihat apakah kemanfaatannya sudah amanah dan didasarkan pada kepentingan nasional.

Terkait ISPS Code, memasuki tahun ke-17 penerapannya, diperlukan konsistensi dan suatu terobosan baru yang profesional dan modern agar aturan tersebut

berjalan secara optimal. Transportasi laut yang bersifat domestik maupun internasional di Indonesia saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pelabuhan sebagai pintu masuk perdagangan internasional tentu saja rentan akan kegiatan ilegal. Saat ini dunia dapat dijelaskan sebagai “*global village*” yang artinya terdapat fenomena saling keterkaitan dalam suatu ruang global karena perkembangan teknologi informasi yang pesat, maka dari itu inovasi bidang maritim untuk memajukan intelijen maritim wajib dikembangkan. Perangkat keamanan seperti sistem identifikasi dan pemantauan kapal serta pelabuhan diharapkan dapat diperbaharui sesuai dengan kurun waktu dan kebutuhannya. Para *crew* kapal dan seluruh pihak darat dalam industri pelayaran harus ditingkatkan kualitasnya dengan cara dididik, dilatih, dan diperhatikan kesejahteraannya. Dengan begitu, hal-hal tersebut dapat menopang keefektifan ISPS Code dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.